

Bimbingan Teknis Regional Implementasi Data Transaksi Pemda Tahun 2020 Gelombang I

Jakarta – Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, DJPK mengadakan Bimbingan Teknis Regional Implementasi Data Transaksi Pemda Tahun 2020. Implementasi data transaksi merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020 dan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-5/PK/2020 yang salah satunya mengatur mengenai penyederhanaan pelaporan data bulanan pemerintah daerah melalui data transaksi pemerintah daerah.

Acara yang diikuti oleh 40 perwakilan pemerintah kabupaten/kota ini berlangsung melalui aplikasi Zoom Meeting, Selasa (20/10/2020). Hadir dalam acara tersebut, Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi Agung Widiadi, untuk memberikan *keynote speech* sekaligus membuka acara.

Dalam sambutannya, Agung Widiadi menyampaikan peran penting interkoneksi data transaksi pemerintah daerah.

“Setelah mengikuti Bimbingan Teknis Regional ini, diharapkan database keuangan pemda dapat terkoneksi dengan SIKD, sehingga dapat juga digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah”, jelasnya kepada para peserta undangan.

Tak hanya memberikan manfaat dalam pembuatan kebijakan, keberhasilan interkoneksi data juga dapat berujung pada pemberian Dana Insentif Daerah bagi daerah yang bersangkutan.

“Interkoneksi data transaksi pemerintah daerah akan dijadikan salah satu kriteria dalam penilaian daerah untuk mendapatkan *reward* berupa Dana Insentif Daerah. Untuk itu kami mengajak partisipasi aktif Bapak/Ibu sekalian dan meningkatkan sinergi antara DJPK dengan Pemerintah Daerah”, ucap Agung.

Peserta kemudian dibagi ke beberapa room terpisah untuk mendapat bimbingan teknis sesuai kondisi dan kendala masing-masing dalam melakukan konfigurasi interkoneksi antara Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Adapun peserta undangan pada bimbingan teknis gelombang pertama kali ini, antara lain:

1. Kabupaten Aceh Selatan
2. Kabupaten Aceh Utara
3. Kota Langsa
4. Kota Lhokseumawe
5. Kabupaten Gayo Lues
6. Kabupaten Aceh Barat Daya
7. Kota Subulussalam
8. Kabupaten Asahan
9. Kabupaten Langkat
10. Kabupaten Mandailing Natal
11. Kabupaten Simalungun
12. Kabupaten Tapanuli Utara
13. Kota Pematang Siantar
14. Kota Tebing Tinggi
15. Kabupaten Nias Selatan
16. Kabupaten Serdang Bedagai
17. Kabupaten Padang Lawas
18. Kabupaten Padang Lawas Utara
19. Kabupaten Labuhanbatu Utara
20. Kabupaten Pasaman
21. Kabupaten Bungo
22. Kabupaten Muara Enim
23. Kota Prabumulih
24. Kota Pagar Alam

25. Kabupaten OKU Selatan
26. Kabupaten Bengkulu Utara
27. Kabupaten Seluma
28. Kabupaten Tulang Bawang
29. Kabupaten Grobogan
30. Kabupaten Sumenep
31. Kabupaten Sintang
32. Provinsi Kalimantan Tengah

33. Kabupaten Barito Utara
34. Kabupaten Kapuas
35. Kabupaten Katingan
36. Kabupaten Gunung Mas
37. Kabupaten Murung Raya
38. Kabupaten Barito Timur
39. Kabupaten Banjar
40. Kabupaten Barito Kuala